

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

PT Jaminan Kredit Indonesia atau disebut juga dengan Jamkrindo merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fokus kegiatan usaha pada bidang penjaminan kredit. Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur. Prinsip dasar penjaminan kredit adalah pengambilalihan atas resiko kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, akan tetapi prinsip tersebut tidak akan menghilangkan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan sampai penerima jaminan menyatakan kredit terjamin tersebut lunas. Penerima jaminan merupakan lembaga keuangan bank maupun non-bank yang memberikan kredit kepada terjamin (UMKM).

PT Jamkrindo berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM melalui layanan penjaminan kredit. Salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh Jamkrindo yaitu memberikan penjaminan pada program Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan modal kerja atau investasi kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum *bankable* atau tidak memiliki kelayakan kredit yang dijamin oleh perusahaan penjamin. PT Jamkrindo berkomitmen untuk menyukseskan program pemerintah yang dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya melalui penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Peran penting UMKM dalam perekonomian yaitu potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan (Sofyan 2017:35). Jumlah UMKM, potensi penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Perkembangan data UMKM tahun 2018-2019 di Indonesia

Indikator	Satuan	Tahun 2018 *)	Tahun 2019 **)	Perkembangan tahun 2018 – 2019
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Unit Usaha	Unit	64.194.057	65.465.497	1.271.440
Tenaga kerja	Orang	116.978.631	119.562.843	2.584.212
PDB	Rp milyar	9.062.581,30	9.580.762,70	518.181,30

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2018 – 2019) (diolah)

Keterangan :

\*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan sebanyak 1.271.440 unit. Peningkatan

jumlah unit usaha berdampak pada penyerapan tenaga kerja UMKM yang meningkat sebanyak 2.584.212 orang. Begitu pula pada kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per-kapita yaitu sebesar Rp 518.181,3 miliar.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat hingga Februari 2022 sebanyak 17,25 juta pelaku UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. Pertumbuhan tersebut dinilai lebih cepat tumbuh 100% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemenkop UKM akan terus mendorong pelaku UMKM agar terhubung ke dalam ekosistem digital. Kemenkop UKM menargetkan 30 juta UMKM bisa terhubung ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberi dukungan akses pembiayaan untuk UMKM salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat.

Saat ini adanya penambahan KUR oleh pemerintah guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional untuk tahun 2022 dengan target sebesar Rp373 triliun atau sebesar 60% (berita Kompas.com). Penyaluran KUR tahun 2022 didominasi oleh BRI sebesar 77,7% atau Rp290 triliun sehingga PT Jamkrindo memiliki target untuk fokus mengejar pasar BRI dengan potensi terbesar di Pulau Jawa. Program KUR memiliki penyalur KUR lembaga keuangan sebanyak 47 lembaga keuangan bank BUMN, swasta, BPD dan KSP. Jenis penyaluran KUR terdiri atas, KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan pekerja migran Indonesia, dan KUR khusus (Permenko No. 1 Tahun 2022 Pasal 16).

Layanan penjaminan kredit yang dilakukan oleh PT Jamkrindo dalam memasarkan produk penjaminan KUR melalui Kantor Cabang yang membawahi Kantor Unit Pelayanan. Namun tidak semua Kantor Cabang memiliki Kantor Unit Pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, PT Jamkrindo perlu melakukan penetrasi pasar yang agresif sebagai rencana pengembangan ide bisnis baru berupa pendirian *Digital Business Unit (DBU)* sebagai upaya pemasaran untuk mencapai target penjaminan KUR. *Digital Business Unit (DBU)* ini diharapkan dapat meningkatkan *market share* penjaminan KUR di tahun 2022 sebesar 60% dengan efektif dan efisien, serta dapat menghemat anggaran perusahaan yang besar berupa biaya sewa, biaya *maintenance* dan biaya SDM. Pendirian DBU ini merupakan rencana pengembangan sebagai solusi dari pada melakukan pendirian Kantor Unit Pelayanan dalam melakukan proses pemasaran. Pendirian KUP tentu akan memerlukan kajian yang mendalam dan anggaran yang besar, sedangkan PT Jamkrindo memiliki target dalam meningkatkan penjaminan KUR sebesar 60% dari penyaluran mitra bank.

PT Jamkrindo berkomitmen terus mendukung penuh dengan cara mempersiapkan strategi pemasaran antara lain melakukan pengembangan sistem penjaminan hingga peningkatan layanan perusahaan. Berdasarkan data yang dicatat pada *website* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, jumlah penyaluran KUR se-provinsi tahun 2021 sebesar Rp 88,08 triliun dengan jumlah 2,404,549 debitur, jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya 2020 sebesar Rp 76 triliun dengan jumlah 2,273,929 debitur. Pada tahun 2021 PT Jamkrindo terdapat realisasi penyaluran penjaminan KUR berdasarkan 9 Kantor Wilayah sebesar Rp 144 triliun, angka ini naik dibandingkan realisasi penyaluran penjaminan KUR tahun 2020 sebesar Rp 102 triliun. Adapun volume penjaminan KUR selama 2 tahun terakhir berdasarkan 12 wilayah kerja usulan *Digital Business Unit (DBU)* sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Volume penjaminan KUR tahun 2020 dan 2021

No	Nama DBU	Volume KUR		YOY%
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	
1	DBU Karawang	390.587.348.332	762.200.601.994	95
2	DBU Purwodadi	646.371.737.485	1.180.553.500.000	83
3	DBU Maumere	333.256.412.047	578.080.727.318	73
4	DBU Blora	1.075.795.243.300	1.726.071.158.000	60
5	DBU Jombang	599.819.070.417	897.253.913.624	50
6	DBU Garut	640.578.718.208	919.452.736.555	44
7	DBU Rengat	109.879.252.545	156.266.426.453	42
8	DBU Baturaja	271.017.926.747	342.616.429.565	26
9	DBU Blitar	900.363.352.206	1.066.551.303.033	18
10	DBU Lamongan	543.171.856.744	624.614.882.722	15
11	DBU Sragen	1.389.093.553.008	1.495.784.631.121	8
12	DBU Tanjung	303.169.274.284	323.909.024.992	7
	Total	7.203.103.745.323	10.073.355.335.377	40

Sumber: Divisi Jaringan dan Layanan (2022)

Berdasarkan Tabel 2 volume penjaminan KUR terdapat total volume KUR tahun 2021 sebesar 10 triliun meningkat dibandingkan tahun 2020 hanya sebesar 7 triliun. Kenaikan volume penjaminan KUR 2021 terhadap penyaluran KUR 2020 ini dapat dijadikan sebagai peluang perusahaan untuk dapat meningkatkan target volume penjaminan KUR di tahun 2022. Dengan melakukan pendirian *Digital Business Unit* (DBU) diharapkan dapat meningkatkan target *market share* KUR pada wilayah kerja usulan dengan melakukan strategi upaya pemasaran yang tepat dengan pendekatan kolaborasi kepada mitra secara langsung.

## 1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan kajian pengembangan bisnis ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan ide rencana pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pada PT Jamkrindo.
2. Menyusun dan mengkaji rencana pengembangan bisnis dengan menganalisis kelayakan berdasarkan aspek non finansial dan aspek finansial pada PT Jamkrindo.

